

PENDIDIKAN BERBASIS RESPONSIF GENDER SEBAGAI UPAYA MERUNTUHKAN SEGREGASI GENDER

Jurnal Analisa Sosiologi
Januari 2021, 10 (Edisi Khusus
Sosiologi Perkotaan): 60-75

Dini Damayanti¹, Fitria Rismaningtyas²

Abstract

Fair education is a right for all human beings. However, application does not always represent justice. Gender segregation is one of the problems in education. The separation between men and women can be a barrier in the learning process. Although access to education is extensive, it does not rule out the possibility that this gender segregation model is still stretched. This model can still be found in some boarding schools and schools with a strongly religious base. Separation can occur in some learning activities as well as the whole activities. This model is believed to perpetuate gender bias and make the relationship between men and women tend to be rigid. Gender responsive education is one way to give students the widest possible space to learn together regardless of gender. The learning process in school tends to give full rights in learning and gives fair attention to the special needs of men and women. The purpose of this paper describes and analyzes how to realize the nuances of gender responsive education. The method used in this writing is qualitative method with descriptive analysis. The theory used to describe the reality of gender segregation in education is the theory of social construction. The results show that realizing a strong education of gender responsiveness requires support from all aspect of life. Aspects of awareness and understanding related to gender equality are important. Forming gender-responsive learning can be done with collaborative learning approaches and methods that collaborate with the participation of both men and women.

Keywords: Learning, Gender Responsiveness, Gender Segregation

Abstrak

Mengenyam pendidikan secara adil merupakan hak bagi semua manusia. Namun, penerapan tidak selalu merepresentasikan keadilan. Segregasi gender menjadi salah satu problematika dalam dunia pendidikan. Dimana pemisahan antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi tembok pembatas dalam proses pembelajaran. Meskipun akses terhadap pendidikan begitu luas, tidak menutup kemungkinan model segregasi gender ini masih melenggang. Model ini masih dapat dijumpai di beberapa pondok pesantren maupun sekolah dengan basis agama yang kuat. Pemisahan dapat terjadi pada sebagian

^{1,2}Sosiologi Agama, IAIN Tulungagung

¹diniidamayanti30@gmail.com

aktivitas belajar maupun keseluruhan aktivitas. Model ini disinyalir dapat melanggengkan bias gender dan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan cenderung kaku. Pendidikan dengan nuansa responsif gender merupakan salah satu cara untuk memberikan ruang seluas-luasnya pada para peserta didik untuk belajar bersama tanpa memandang gender. Pembelajaran cenderung memberikan hak sepenuhnya dalam belajar dan memberikan perhatian yang adil bagi kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan. Tujuan penulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana mewujudkan nuansa pendidikan yang responsif gender. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sedangkan teori yang dipakai untuk menggambarkan realitas segregasi gender dalam pendidikan adalah teori konstruksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mewujudkan pendidikan yang kental akan nuansa responsif gender membutuhkan *support* dari semua lapisan masyarakat. Aspek kesadaran dan pemahaman terkait dengan kesetaraan gender adalah penting. Membentuk pembelajaran yang responsif gender dapat dilakukan dengan pendekatan maupun metode pengajaran yang bersifat kolaboratif (*collaborative learning*) yang menggandeng partisipasi baik laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci: Pembelajaran, Responsif Gender, Segregasi Gender

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Ia hadir sebagai upaya untuk dapat mengembangkan budi pekerti luhur, mengaktifkan pikiran, menguatkan jasmani demi mewujudkan fitrahnya sebagai manusia. Pentingnya pendidikan juga agar manusia tidak terjerembab kelamnya kebodohan dan demi dapat menyemai kebermanfaatan seluas-luasnya pada bumi. Mengingat begitu pentingnya pendidikan, tidak pelak bahwa baik laki-laki maupun perempuan dengan bagaimana pun kondisinya, berhak mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

Demi dapat mewujudkan suatu pendidikan yang memadai, terdapat ragam model pembelajaran yang diterapkan. Salah satunya adalah segregasi gender dalam pendidikan. Segregasi gender pendidikan singkatnya merupakan suatu model pembelajaran dalam dunia pendidikan yang memisahkan kelas maupun aktivitas secara keseluruhan ke dalam dua kelompok, yakni laki-laki dan perempuan (Rohmawati, 2018). Seringnya praktik segregasi gender dalam pendidikan ini dijumpai di beberapa pondok pesantren maupun sekolah dengan basis agama yang ketat. Pemisahan tidak hanya terjadi dalam tempat tinggal, namun juga kelas hingga materi pelajaran (Muafiah, 2018).

Faktor agama adalah salah satu dalih yang melegitimasi adanya segregasi gender dalam pendidikan. Seperti pondok pesantren yang memisahkan laki-laki dan perempuan agar memudahkan sistem pembelajaran dan mengontrol tata laku supaya sesuai dengan tuntunan Islam. Ditakutkan nantinya jika tidak ada batas, akan terjadi hal-hal yang mendatangkan *kemudharatan* atau kerugian. Selain itu, segregasi dilakukan dengan sengaja sebab beberapa pondok pesantren mengikuti madzab dari para ulama *fiqh* yang termuat dalam kitab-kitab klasik yang menempatkan perempuan secara berbeda.

Perempuan tidak dianjurkan untuk tampil di publik. Walaupun diharuskan tampil, maka hanya dalam satu komunitas perempuan saja (Triyoga, 2016).

Model satu ini sebenarnya masih menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Bagi yang tidak setuju beranggapan bahwa model segregasi gender dalam pendidikan tanpa disadari dapat membentuk hubungan yang kaku antara laki-laki dan perempuan. Padahal, dalam kehidupan bermasyarakat laki-laki dan perempuan senantiasa membutuhkan satu sama lain dan hidup berkesalingan. Pun segregasi gender ini akan melanggengkan bias gender yang mana perempuan lebih banyak dirugikan. Seyogyanya, laki-laki dan perempuan mampu bertumbuh dengan baik dan berkompetisi dengan sehat serta hadirnya segregasi gender ini dapat membatasi ruang ekspresi mereka.

Melihat realitas yang demikian, pendidikan semestinya mampu menghadirkan nuansa setara yang memberikan ruang seluas-luasnya tanpa pandang gender. Pendidikan berbasis responsif gender menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Responsif gender dalam pendidikan berarti tidak melakukan pembatasan maupun perbedaan atas perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan hak mereka memperoleh ilmu. Pembelajaran dengan basis responsif gender juga memberikan perhatian yang adil bagi kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan (Wibowo, 2010).

Pembelajaran dengan responsif gender ini turut memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam proses belajar. Tidak lagi ada laki-laki yang lebih diunggulkan daripada perempuan. Namun, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk tampil di depan. Tujuan dari pendidikan yang ramah gender seperti ini adalah demi mewujudkan kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan dapat memahami serta memainkan posisi peran mereka dengan baik. Sekolah atau lembaga pendidikan baik formal maupun informal menjadi tempat yang dapat berkontribusi bagi perbaikan pola pikir. Maka dari itu, penerapan pendidikan berbasis responsif gender dapat bermanfaat demi mengubah cara pandang yang bias gender.

Pemahaman terhadap gender dalam masyarakat nyatanya masih menuai sejumlah problematika. Perbedaan gender akan menempatkan perlakuan berbeda yang cenderung tidak responsif gender yang berimplikasi pada beragam sektor, termasuk pendidikan. Dalam teori konstruksi sosial, gender dan penerapannya di masyarakat dipahami sebagai hasil bentukan masyarakat, sehingga sifatnya lentur dan tidak permanen. Teori konstruksi sosial milik Peter L Berger dan Thomas Luckman ini mengurai tiga tahap yakni eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi yang kemudian membentuk suatu keyakinan yang dipercaya atau dijalankan secara kolektif.

Berangkat dari realitas bahwa gender merupakan hasil konstruksi masyarakat, maka akan selalu ada upaya untuk memperbaiki pemahaman mengenai gender menjadi lebih baik. Termasuk pada bagaimana pemahaman ini akan berimplikasi pada sektor pendidikan dan termanifestasi pada penerapan model pembelajarannya yang responsif gender. Lembaga pendidikan dapat menjadi wadah yang baik untuk memperkenalkan kembali konsep gender yang lebih ramah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bersifat deskriptif dan menitik beratkan pada analisis terhadap suatu fenomena. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Singkatnya, merupakan pendekatan analisis yang bertujuan menyajikan gambaran fenomena-fenomena yang ada, baik yang tengah berlangsung saat ini maupun yang telah berlalu. Cenderung menggambarkan suatu fenomena dengan apa adanya melalui telaah secara teratur, mengutamakan objektivikasi dan dilakukan secara cermat (Furchan, 2004). Fenomena yang hendak ditekankan adalah model segregasi gender dalam pendidikan yang masih bisa ditemui di beberapa pesantren maupun sekolah dengan basis agama yang kuat.

Berangkat dari ragam sumber *literature*, kedua model lembaga pendidikan ini dikenal masih menerapkan model pembelajaran dengan sistem segregasi. Faktor agama dan masih kuatnya kepercayaan akan konstruksi masyarakat terdahulu terkait perbedaan laki-laki dan perempuan menjadi faktor dominan sistem segregasi tetap dijalankan.

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi *literature* dari ragam sumber yang menyoal terkait dengan sistem segregasi gender dalam pendidikan. Studi *literature* merupakan model pencarian referensi yang relevan dengan topik yang diangkat. Studi *literature* didapat melalui buku, jurnal, artikel maupun situs-situs internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pendidikan Bernuansa Responsif Gender dan Manifestasi dalam Bentuk Sekolah Inklusi

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan hadir sebagai sarana membantu manusia untuk dapat mengembangkan kemampuan maupun potensi kemanusiaannya. Keberadaan lingkungan menjadi satu hal yang lekat dengan manusia. Sehingga, proses pendidikan akan senantiasa bersinggungan dengan lingkungan dan pada akhirnya secara timbal balik akan saling mempengaruhi (Hangestiningih, 2015).

Pendidikan semestinya hadir secara setara di hadapan manusia, terutama terkait bagaimana proses pendidikan tersebut dijalankan. Proses pendidikan melibatkan interaksi yang terjalin dengan baik. Kurikulum dan model sistem pembelajaran yang diterapkan

juga turut menjadi poin penting dalam menciptakan tujuan pendidikan yang dapat menyasar semua pihak.

Model segregasi gender yang diterapkan pada beberapa lembaga pendidikan tertentu nyatanya masih menuai sejumlah problematika. Diantaranya terkait pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan cenderung kaku, dapat melanggengkan bias gender dan lain sebagainya. Masih perlu adanya evaluasi secara seksama, perhatian, dan kesadaran dari berbagai pihak untuk menciptakan model pembelajaran yang komprehensif agar manfaatnya mampu menyasar seluruh peserta didik dengan baik.

Pendidikan dengan nuansa responsif gender dapat dijadikan solusi untuk menghadirkan suatu pola pembelajaran yang ramah. Pemahaman terhadap kesetaraan maupun keadilan gender dapat menjadi bekal yang baik untuk kemudian dapat diterapkan pada lembaga pendidikan. Memahami bahwa bentuk segregasi pada proses pembelajaran bukan satu-satunya solusi efektif guna menangkal hal-hal menyimpang dan alasan lainnya. Para peserta didik memiliki kesempatan sama untuk mengenyam pendidikan dengan baik tanpa terkungkung oleh bias gender dalam masyarakat.

Model sekolah inklusi dapat menjadi solusi dalam menerapkan pola pembelajaran yang responsif gender. Sekolah inklusi hadir dengan mengadopsi pendidikan inklusi yang melihat seluruh peserta didik memiliki kesempatan sama dan tidak ada pembeda di antara mereka, termasuk perbedaan soal gender, sehingga ini dapat menjadi salah satu solusi tepat untuk bisa dipertimbangkan demi menghadirkan pendidikan tanpa segregasi terutama segregasi gender. Tentu demi merealisasikannya lebih luas, perlu adanya kesadaran kolektif sekaligus sokongan dari berbagai lapisan masyarakat.

Pembahasan

Model Pembelajaran Sistem Segregasi Gender

Dalam proses pembelajarannya, pondok pesantren kental akan model segregasi gender. Seperti Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan, Ponorogo, Jawa Timur, dan Pondok Pesantren Wali Songo. Kedua pondok pesantren ini lekat akan model segregasi yang masih dijalankan hingga sekarang. Pemisahan terjadi dalam lingkungan fisik dan non-fisik. Pemisahan pada aspek fisik dilihat pada perbedaan lembaga pendidikan formal yang dibuat terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sementara pada aspek non-fisik termasuk pada asrama, kelas pembelajaran, struktur organisasi, kurikulum, struktur mata pelajaran, kegiatan ekstra, dan guru serta cara mengajar.

Di Pondok Pesantren Darul Huda, bahkan penerapan segregasi menyeluruh di semua lembaga pendidikan naungannya. Lembaga pendidikan formal mencakup Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan lembaga pendidikan non-formal meliputi kegiatan di luar pendidikan formal yang diisi dengan pengajian Al-Quran maupun kitab klasik. Pondok Pesantren Wali Songo juga terdiri atas lembaga formal dan non-formal. Pendidikan formal tingkat menengah di pondok dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki diberi nama *Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah* dan

untuk perempuan diberi nama *Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah*. Keduanya dikepalai oleh kepala sekolah yang berbeda. Model pembedaan ini sudah dijalankan bahkan sejak berdirinya pada tahun 1858 oleh KH. Moh. Thoyyib (Muafiah, 2018: 1071).

Faktor agama merupakan salah satu yang mendasari masih diterapkannya model segregasi dalam pesantren. Term hijab dalam Al-Quran tepatnya yang termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 53, menjadi landasan penetapan kebijakan segregasi. Kata hijab dimaknai sebagai sesuatu tirai, penghalau maupun penyekat yang mengharuskan laki-laki dan perempuan memiliki sekat atau batasan saat berkomunikasi maupun bertemu secara langsung. Disinyalir berdasar pada ayat ini, dimaksudkan demi menjaga kesucian baik laki-laki maupun perempuan. Kitab *Sulam al-Taqqiq* juga turut melegitimasinya. Perbuatan maksiat sekecil hanya lewat pandangan merupakan salah satu hal yang begitu ditekankan supaya tidak terjadi. Apalagi kebanyakan santri maupun murid berada dalam masa pubertas atau remaja yang akan sangat rawan untuk melakukan tindakan maksiat terhadap lawan jenis (Muafiah, 2018: 1075).

Sejalan dengan model segregasi yang diterapkan di pesantren, SMP Al-Falah Ketintang Surabaya menjadi salah satu sekolah berbasis agama yang juga menerapkan segregasi. Sekolah dengan desain dua lantai ini, menjadikan lantai satu diperuntukan untuk kelas laki-laki dan lantai dua untuk kelas perempuan. Sebagai satuan pendidikan, sistem pendidikan yang digunakan benar-benar terpisah dari sistem pendidikan sekolah reguler.

Sistem segregasi yang diterapkan di SMP Al-Falah dinilai tepat sebagai bentuk tindakan preventif berupa interaksi negatif yang mewujud dalam perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja. Sistem segregasi yang diterapkan sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor agama. Tujuannya pun sebenarnya menekankan agar murid-murid terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Selain itu, sistem ini menjadi standarisasi dalam upaya pengembangan sistem pembinaan akidah dan akhlak.

Selain faktor agama yang dominan, alasan lain juga terletak pada faktor psikologis. Pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang kelas dilihat tepat demi meningkatkan rasa percaya diri murid saat berbicara di depan kelas. Pemisahan dirasa mampu memberikan ruang bagi tiap individu berekspresi tanpa takut ditertawakan maupun direndahkan oleh kawan lawan jenis (Subaidi, 2019).

Sedikit contoh di atas memang tidak bisa memberikan gambaran penuh mengenai pengaplikasian model pembelajaran dengan sistem segregasi gender. Namun, beberapa pondok pesantren maupun sekolah dengan basis agama yang kuat dirasa lebih banyak menggunakan model pembelajaran ini daripada lembaga pendidikan lain, baik sekolah umum atau reguler, maupun di taraf lembaga bimbingan belajar. Saya melihat ada dua faktor dominan yang melatar belakangi penerapannya, yakni faktor agama dan juga faktor psikologis yang sebenarnya ini merupakan konstruksi masyarakat.

Faktor agama yang dijadikan landasan memang tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Ini berlandas pada latar sosio-religius masing-masing yang tentu tidak bisa digeneralisir. Saya selalu meyakini bahwa Islam merupakan agama yang begitu adil dan sarat akan nilai

cinta kasih. Termasuk dalam urusan menuntut ilmu. Seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW, “Menuntut ilmu itu wajib bagi diri setiap muslim” (HR. Bukhari). Maka, setiap diri yang mengaku muslim, wajib baginya menuntut ilmu, tanpa memandang jenis kelamin maupun status gendernya. Hak belajar tentu menjadi titik tekan agar dapat dilaksanakan secara adil dan menjamin bahwa keseluruhan peserta didik dapat memperoleh akses yang baik.

Sementara persoalan demi menghindari pandangan yang nantinya berujung pada syahwat dan hal-hal yang tidak diinginkan, memang akan begitu sukar untuk tidak dijalankan, baik oleh pondok pesantren maupun sekolah berbasis agama. Hal ini karena kedudukan baik laki-laki dan perempuan begitu dihormati dan demi menjaga kesucian. Apalagi pesantren dan sekolah berbasis agama memiliki kultur atau ciri yang khas, salah satunya dengan sistem segregasi. Hanya saja persoalan ini sebenarnya dapat dikendalikan dengan menanamkan pemahaman soal seks edukasi dengan baik. Memperkenalkan bagaimana santri maupun murid dapat menghormati sesama dan mengendalikan nafsunya dengan cara yang benar. Pemisahan kelas memang bisa menjadi jalan untuk meminimalisir laki-laki dan perempuan bertemu. Hanya saja, hal ini juga menciptakan persoalan lain. Misalnya, hubungan antara keduanya akan cenderung kaku. Padahal, kelak di masyarakat, mereka akan membaaur dengan masyarakat yang sudah tentu beragama.

Faktor lainnya terkait dengan psikologis yang ditetapkan kepada laki-laki dan perempuan, yang menurut saya ini termasuk pada ranah konstruksi masyarakat. Penyifatan pada mereka bukanlah sesuatu yang mutlak dan pasti, ini termasuk dalam contoh gender. Gender yang berurat akar pada masyarakat, sebenarnya dapat dipertukarkan. Sisi maskulin pada laki-laki tidak bisa digeneralisir pada setiap laki-laki, begitu pula dengan sisi feminin pada perempuan. Pemisahan yang dilakukan dengan dalih agar memberikan ruang setiap murid berekspresi tanpa takut direndahkan, saya kira akan lebih baik jika semua murid lebih diajarkan untuk mengedepankan sikap saling menghargai terhadap orang lain. Menekankan bahwa tidak ada yang patut ditertawakan atau diremehkan atas hasil kerja keras orang lain, apalagi didasarkan pada jenis kelamin maupun gender tertentu. Dalam kegiatan belajar, semua hendaknya diletakkan pada posisi setara dan ditempatkan pada suasana yang nyaman.

Mengurai Fenomena Segregasi Gender Lewat Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial atas realitas (*Social Construction of Reality*) dipahami sebagai suatu proses sosial yang melalui tindakan dan interaksi pada individu atau sekelompok individu, dan dilakukan secara terus-menerus hingga menciptakan suatu realitas yang kemudian dimiliki dan dialami secara subjektif. Teori ini berurat akar pada paradigma konstruktivis. Realitas sosial yang ada dinilai sebagai suatu hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu.

Kedudukan individu dinilai sebagai manusia yang bebas. Individu merupakan penentu dalam dunia sosial yang sejatinya dikonstruksi sesuai dengan kehendaknya. Pada ranah proses sosial, manusia dilihat sebagai pencipta dari apa yang disebut sebagai realitas sosial yang relatif bebas dalam dunia sosial (Sihotang, 2017).

Fenomena segregasi gender dalam dunia pendidikan yang masih melenggang hingga saat ini, dapat ditilik melalui teori konstruksi sosial. Konstruksi kenyataan sosial menjadi satu istilah yang akrab oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, untuk mengembangkan suatu proses di mana melalui tindakan dan juga interaksi yang kontinu, untuk kemudian menciptakan kenyataan yang dipercaya, dimiliki secara kolektif, yang dialami secara faktual objektif dan secara subjektif penuh arti (Prasasti, 2013).

Segregasi gender merupakan satu bentuk konstruksi sosial yang dibentuk oleh individu. Sehingga, suatu proses pemaknaan yang dilakukan bagi tiap individu terhadap lingkungan sekaligus aspek di luar dirinya, terdiri dari tiga proses. Yakni proses eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.

Proses eksternalisasi menjadi awal kontruksi sosial masyarakat itu terbentuk. Di mana seseorang melakukan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya. Tahap eksternalisasi dalam konteks segregasi gender ini, berupa proses adaptasi terhadap teks agama, norma, nilai, dan lain sebagainya yang berada di luar diri manusia dan berlaku dalam masyarakat. Misal, dalam teks agama, menekankan pentingnya menjaga batas dan kehormatan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender, menjadi suatu norma di masyarakat, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perannya sendiri secara terpisah. Pemahaman ini senantiasa dilanggengkan dengan diturunkan ke tiap generasi.

Kemudian pada proses objektivikasi, terjadi setelah individu melakukan pengulangan secara konsisten dan kontinu pada tindakan. Kesadaran akan tindakan yang berulang, akan membawa manusia pada keyakinan bahwa realitas yang terjadi disebabkan ada kaidah yang mengatur. Tahap objektivikasi pada penelitian ini, bahwa pandangan akan laki-laki dan perempuan telah ditentukan dan keduanya seharusnya memiliki batasan agar tidak terjadi hal menyimpang, termasuk dalam pendidikan. Pemahaman ini kemudian menjadi suatu realitas objektif.

Tahap internalisasi dikenal sebagai tahap terakhir manusia dalam memaknai realitas sosial di sekitarnya. Individu akan menyerap segala hal yang bersifat objektif untuk kemudian direalisasikan secara subjektif. Internalisasi akan berlangsung secara terus-menerus melalui sosialisasi. Dalam pembahasan ini, tahap internalisasi dapat dilihat ketika mereka meyakini bahwa pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan adalah suatu hal yang tepat. Sehingga, sekolah maupun lembaga pendidikan dengan sistem segregasi, dinilai tepat sesuai dengan ajaran agama dan sebagai langkah preventif mencegah hal tidak diinginkan (Awaru, 2020).

Realitas gender yang telah ditetapkan baik untuk laki-laki dan perempuan, serta pemisahan antara keduanya, merupakan suatu bentuk konstruksi sosial. Mereka memahami bahwa keduanya berbeda dan ditimpali dengan legitimasi agama. Maka, ini akan sejalan dengan pendapat Peter L. Berger dan Thomas Luckman, bahwa realitas yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu, sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi yang dibentuk masyarakat itu sendiri.

Membangun Pendidikan Bernuansa Responsif Gender

Sebelum jauh melangkah pada contoh penerapan pendidikan dengan nuansa responsif gender, akan begitu penting untuk diuraikan ihwal kesetaraan gender. Secara harfiah, sebenarnya konsep kesetaraan gender sendiri dapat berarti bahwa adanya suatu kondisi antara laki-laki dan perempuan dengan ragam ekspresi gender mereka, untuk sama-sama memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Termasuk juga berkesempatan untuk berpartisipasi, menjalankan dan berkontribusi pada ragam aspek kehidupan masyarakat, seperti pada ekonomi, politik dan pendidikan. Tidak hanya itu, kesetaraan gender juga mengakomodasi adanya kesamaan akses terhadap fasilitas, pembangunan dan hasilnya.

Terwujudnya kesetaraan gender setidaknya bisa dilihat dalam beberapa indikator, diantaranya:

1. Tersedianya akses.

Akses di sini termasuk dalam peluang dan juga kesempatan terhadap penggunaan serta pemanfaatan sumber daya tertentu. Pemerataan dan keadilan perlu menjadi hal yang diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk kemudian dapat dimanfaatkan dengan baik.

2. Partisipasi.

Partisipasi di sini merujuk pada keikutsertaan dalam suatu kelompok untuk bisa andil dalam pengambilan keputusan. Hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, semestinya memang mengutamakan kesejahteraan banyak orang. Maka, suara dari ragam ekspresi gender perlu dipertimbangkan agar keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak dan benar-benar dapat mencapai keputusan bersama yang baik.

3. Kontrol.

Masyarakat dengan paham kesetaraan gender yang baik, akan melihat bahwa kontrol atau penguasaan dalam suatu keputusan yang ada, tidak didominasi oleh jenis kelamin tertentu.

4. Manfaat.

Hal ini merujuk pada kegunaan yang dapat dirasakan bersama secara optimal. Kegunaan di sini dapat berupa hasil keputusan, pembangunan maupun sarana dan prasarana yang memadai (Ismail, et al., 2020).

Kesetaraan gender juga berarti meliputi adanya jaminan bahwa tidak adanya diskriminasi dan ketidakadilan secara struktural terhadap laki-laki maupun perempuan. Hal ini juga akan berimbas pada penerapan pendidikan yang berkeadilan gender. Artinya, adanya suatu proses dan perlakuan adil. Selain itu, juga memastikan tidak adanya pembakuan peran, tindakan marginalisasi, subordinasi, beban ganda bahkan kekerasan baik kepada laki-laki maupun perempuan (Achmad, 2019).

Pemahaman akan kesetaraan gender ini penting saya kira. Di mana jika individu, maupun lebih luas lagi dalam lingkup masyarakat memiliki pondasi memadai dalam memahami gender, akan dapat menerapkan dan menyebarkannya dengan baik. Karena dalam hal ini membincang perihal ranah pendidikan, maka guru atau tenaga pendidik lainnya memiliki posisi sentral untuk bisa memahami ihwal kesetaraan gender untuk

kemudian dapat diimplementasikan dalam lingkup sekolah, terutama pada proses belajar mengajar. Maka, perlu kiranya jalannya pendidikan disokong oleh pihak-pihak yang berjuang pada tercapainya upaya kesetaraan gender.

Pendidikan dengan nuansa responsif gender merupakan salah satu cara membentuk proses belajar mengajar yang ramah. Responsif gender dalam pendidikan, berarti menerapkan proses pembelajaran dengan memberikan perhatian secara adil baik bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Sekaligus turut memberikan sumbangsih pada tercapainya tujuan pendidikan, utamanya dalam proses internalisasi, apa yang baik atau tidak untuk dilakukan, serta mentransfer nilai-nilai kemanusiaan secara berimbang.

Nuansa responsif gender dapat dibentuk dengan memperhatikan keterjaminan akses terhadap pendidikan dilakukan dengan adil dan setara. Seperti dalam belajar soal keterampilan menjahit atau belajar soal teknik bermain sepak bola, maka baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama diberikan akses belajar atau setidaknya mengetahui dasarnya, tanpa membedakan jenis kelamin. Begitu pula dengan memberikan pilihan seluas-luasnya bagi murid untuk memilih minat yang disukai tanpa memarginalkan salah satu jenis kelamin. Misal, tidak ada yang salah dengan laki-laki yang hendak menekuni bakat di bidang seni tari atau murid perempuan yang hendak belajar soal robotika. Keterjaminan akses terhadap partisipasi peserta didik ini tentu harus dibarengi dengan manfaat yang hendak dicapai, yakni memberikan akses pada partisipasi setiap murid untuk belajar.

Proses pembelajaran dengan responsif gender juga dibangun dengan mengedepankan hak dan kewajiban peserta didik selama belajar. Para peserta didik dapat belajar secara aktif, menunjukkan kreativitasnya dan membentuk suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, mereka diberikan kesempatan untuk belajar secara efektif dan terbuka terhadap pengalaman diri maupun pengetahuan yang didapat. Tentu dengan tujuan saling belajar dan didukung dengan penyampaian yang baik tanpa diskriminasi. Misalkan ketika perempuan diberikan kesempatan membincang mengenai pengalaman mereka menstruasi dan pengetahuan apa yang didapat soal menstruasi pada perempuan. Keterbukaan ini akan memberikan kesempatan adanya dialog terhadap pengalaman yang berbeda, serta mengharapkan adanya sikap yang baik terkait persoalan ini.

Laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kerap dikotak-kotakan, seperti laki-laki adalah sosok kuat, sementara perempuan adalah sosok lemah lembut. Dalam pendidikan dengan nuansa responsif gender, memahami bahwa mereka memiliki kesempatan memainkan perannya tanpa terkungkung oleh konstruksi masyarakat. Misalkan, perempuan berhak memimpin kelas, tanpa dibayang-bayangi oleh pengkotakan terhadap perempuan yang menilainya lebih mengutamakan perasaan hingga dirasa tidak pantas memimpin.

Demi membangun nuansa responsif gender, tentu peran tenaga pendidik dalam hal ini guru dan sejenisnya begitu penting. Tenaga pendidik diharapkan memiliki pemahaman akan kesetaraan gender, untuk dapat melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan

yang ramah gender. Dalam mengajar, tenaga pendidik harus memastikan diri dapat memberikan keleluasaan agar semua peserta didik dapat berpartisipasi. Tenaga pendidik hendaknya juga tidak melanggengkan pelabelan terhadap laki-laki maupun perempuan yang termanifestasi semisal lewat penggunaan bahasa atau percakapan. Seperti mengatakan bahwa laki-laki memang tidak setekun perempuan dalam mengerjakan sesuatu, atau mengatakan bahwa perempuan seharusnya tidak berteriak keras sama seperti laki-laki karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan keharusan pada diri perempuan. Selain itu, tenaga pendidik senantiasa memperhatikan jalannya proses belajar di kelas, dan memastikan tidak ada dominasi oleh salah satu jenis kelamin. Interaksi yang tercipta di kelas haruslah berjalan seimbang dengan mempertimbangkan bagaimana pendapat dari masing-masing murid tanpa membedakannya.

Tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah mengenai materi pembelajaran. Sebenarnya ini akan lebih mengarah pada peran pemerintah dalam menyediakan kurikulum maupun bahan ajar berupa buku dan lain sebagainya. Upaya memasukkan paham gender yang baik, sebenarnya nampak dalam adanya Indeks Kurikulum Kesetaraan Gender (IKKG) dengan segenap nilai-nilai integritas pada kurikulum yang sudah semestinya diterapkan oleh para tenaga pendidik. Pengimplementasiannya dalam proses belajar mengajar, diantaranya: persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perbedaan fisik laki-laki dan perempuan, adanya partisipasi, keadilan, kerja sama, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga menekankan sikap saling menghargai kemajemukan dan menegakkan demokrasi (Mursidah, 2013).

Pendidikan dengan nuansa responsif gender, hendaknya juga didukung dengan materi belajar yang bebas akan bentuk *stereotype* gender tertentu atau melanggengkan bias gender. Misalkan buku yang memperlihatkan pekerjaan rumah tangga selalu dikaitkan dengan kewajiban perempuan atau laki-laki selalu dilekatkan dengan tanggung jawab besar seperti mencari nafkah dan menjadi pemimpin. Terkadang juga selalu melekatkan laki-laki dan perempuan dengan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, laki-laki kerap digambarkan bekerja sebagai polisi, tentara dan sejenisnya, sementara perempuan sebagai ibu rumah tangga, penjahit atau sejenisnya. Biasanya hal ini nampak pada ilustrasi maupun narasi-narasi dalam bentuk cerita atau yang lainnya. Seharusnya bahan ajar dapat dipastikan memiliki semangat kesalingan dan menjunjung tinggi kesetaraan.

Sekolah maupun lembaga pendidikan lain sejenisnya, hendaknya juga memberikan ruang dan fasilitas nyaman kepada para peserta didiknya. Seperti keterjaminan ruang laboratorium yang nyaman bagi laki-laki maupun perempuan, ketersediaan tempat ibadah yang sesuai kebutuhan dan lain sebagainya. Begitu pula dalam pembagian kelas maupun pembagian dalam kegiatan belajar yang hendaknya dilakukan dengan mencampur laki-laki dan perempuan. Hal ini akan memberikan kesempatan luas bagi tiap peserta didik saling berpartisipasi, berinteraksi positif, dan berekspresi dengan baik.

Pendidikan dengan nuansa responsif gender, memiliki tujuan supaya pemahaman terhadap gender yang merupakan konstruksi sosial dan termanifestasikan dalam berbagai sektor yang dinilai menuai sejumlah problematika, dapat diatasi atau setidaknya diperbaiki menjadi lebih baik. Konsep pembelajaran dengan nuansa responsif gender ini juga

dipahami sebagai satu bentuk hasil konstruksi sosial yang diharapkan dapat memperbaiki struktur pelebagaan utamanya dalam bidang pendidikan. Tahapan konstruksi sosial dalam pola penerapan pendidikan responsif gender dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

NO.	TAHAP	DEFINISI	PENERAPAN
1.	Eksternalisasi	Proses adaptasi individu terhadap lingkungan sosialnya. Proses ini akan senantiasa berkembang, mengingat dunia manusia merupakan dunia yang dikonstruksi oleh aktivitas manusia sendiri. Dunia manusia yang dibentuk itu berupa kebudayaan yang memiliki tujuan memperbaiki struktur yang ada, sehingga sifatnya tidak stabil dan memiliki kemungkinan berubah.	Dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan dipandang memiliki perbedaan tidak hanya dalam unsur biologis, namun juga secara sosial (gender). Perbedaan gender yang dipahami secara sosial kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada penerapannya di sektor pendidikan. Namun, penerapan perbedaan gender nyata-nya menuai sejumlah problematika, sehingga mencuatkan adanya konsep kesetaraan gender dalam ragam sektor, termasuk pendidikan, yang semestinya responsif gender.
2.	Objektivikasi	Seluruh aktivitas manusia yang terjadi dan dipahami pada tahap eksternalisasi, kemudian akan membentuk suatu pola pembiasaan atau dilakukan berulang-ulang (habitualisasi). Proses ini kemudian mengalami pelembagaan. Di balik pembiasaan ini, sangat mungkin terjadi inovasi. Dan pemahaman ini biasanya diteruskan lewat proses sosialisasi.	Pemahaman dan kesadaran individu bahwa gender adalah sesuatu yang bukan mutlak dan dapat dipertukarkan, akan berimbas pada penerapan pola perilaku sehari-hari dan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Dalam sektor pendidikan, pemahaman ini akan diterapkan dalam proses belajar mengajar yang termanifestasikan misalnya dalam pendidikan bernuansa responsif gender. Tindakan yang dipahami dan dilakukan secara berulang akan membentuk pelembagaan yang baru, yang akan memperbarui pelembagaan lama yang dinilai belum responsif gender.
3.	Internalisasi	Tahap terakhir di mana individu melakukan proses pemahaman atau penafsiran secara langsung terhadap peristiwa objektif sebagai bagian pengungkapan makna. Internalisasi juga berarti suatu proses peresapan kembali realitas untuk kemudian ditransformasikan kembali dari	Sekolah maupun lembaga pendidikan lain yang telah memahami konsep kesetaraan gender dan dimanifestasikan dalam pola pembelajarannya yang responsif gender, akan mencoba melakukan sosialisasi –sosialisasi sekunder– terhadap para peserta didik. Di dalamnya akan ada proses pemaknaan ulang terhadap gender

	<p>struktur dunia objektif ke subjektif oleh individu. Proses untuk mencapai tahap ini, dilakukan setelah mencapai taraf sosialisasi. Terdapat dua macam yakni sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer berada pada tahap anak-anak, sedangkan sosialisasi sekunder merupakan setiap proses berikutnya ke dalam sektor baru dunia objektif masyarakat. Proses sosialisasi sifatnya tidak pernah selesai dan akan selalu berkembang utamanya dalam tahap sosialisasi sekunder. Didukung adanya kompleksitas pembagian kerja dan distribusi pengetahuan.</p>	<p>yang selama ini dipahami masyarakat kurang ramah menyasar ragam sektor, seperti pada sektor pendidikan. Proses ini akan senantiasa diteruskan lewat sosialisasi, seiring dengan senantiasa adanya proses transformasi pengetahuan baru yang lebih baik. Proses sosialisasi dilakukan tidak hanya sebatas pada ungkapan, namun termanifestasikan pula pada pola perilaku yang diterapkan di lembaga pendidikan yang responsif gender.</p>
--	---	---

Bagan 1. Penerapan Teori Konstruksi Sosial Pada Model Pendidikan Responsif Gender

Demi mewujudkan pendidikan responsif gender untuk tidak lagi berkuat pada model pembelajaran dengan sistem segregasi, dapat dilakukan dengan menciptakan sekolah inklusi. Model sekolah inklusi secara otomatis akan menerapkan pendidikan inklusi. Menurut Hildegun Olsen, pendidikan inklusi merupakan satu model pendidikan yang diterapkan sekolah atau lembaga pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, sosial emosional, tingkat intelektual maupun kondisi lainnya (Tarmansyah, 2007). Tepat saya kira jika sekolah mampu menerapkan pendidikan secara inklusi. Pembelajaran akan hadir tanpa pembedaan, termasuk pembedaan soal gender.

Pembelajaran di sekolah inklusi, nampak dalam setidaknya lima ciri khas atau profilnya. Pertama, pendidikan yang dilakukan secara inklusi berarti turut menciptakan, menjaga dan memelihara komunitas kelas supaya tetap hangat, dan ramah dengan kemajemukan. Di sini, peran guru menjadi dominan dalam menjamin peserta didik di kelas menjadi akrab dengan perbedaan satu sama lain, sekaligus sama-sama menghargai dan menjamin ruang yang aman selama proses belajar. Kedua, mengajar pada kelas yang heterogen akan memerlukan perubahan yang diimbangi dengan pelaksanaan kurikulum secara mendasar dan terstruktur. Hal ini diwujudkan dengan buku ajar yang ramah gender dan pendekatan pembelajaran yang tidak kaku dan mengedepankan kooperatif.

Ketiga, pendidikan inklusi mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Dalam hal ini, proses pembelajaran tidak berpusat hanya pada guru yang mengajar atau memberikan ilmu. Namun, proses pembelajaran akan melibatkan kerja sama peserta didik untuk saling belajar dan mengajar. Para peserta didik tidak akan melihat suasana dalam kelas sebagai kompetisi, akan tetapi saling belajar satu sama lain. Keempat, pendidikan

inklusi juga memberikan dorongan pada guru dan kelasnya secara kontinu dan menghapus hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Hal ini sebenarnya menekankan profesi guru yang begitu sentral dan hendaknya melakukan kolaborasi dan konsultasi dengan ragam profesi lain seperti para profesional. Tentu ini akan memberi perluasan wawasan dan pengetahuan bagi guru dan peserta didik. Kelima, pendidikan inklusi senantiasa melibatkan peran orang tua. Maksudnya, partisipasi orang tua dalam pendidikan anaknya sangat diperlukan. Orang tua dapat dilibatkan dalam penyusunan program yang mampu menyasar setiap peserta didik (Suharni, 2016).

Sekolah atau lembaga pendidikan lain sejenis yang inklusi, dilihat sebagai suatu institusi pendidikan yang ayom kepada keseluruhan peserta didik, tanpa memandang perbedaan. Artinya, sekolah memahami betul bahwa tidak ada perbedaan kepada seluruh peserta didik. Mereka dipandang memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama untuk belajar, berkreasi dan berinovasi. Mereka pun diberikan ruang yang nyaman dan aman untuk saling melakukan kerja sama dengan peserta didik lain dalam kegiatan belajar. Selain itu, juga dengan selalu mengedepankan rasa saling menghargai dan memperlakukan sesamanya dengan baik.

KESIMPULAN

Pendidikan sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia, semestinya hadir secara setara dan memberikan kontribusi pada pola pikir serta perilaku manusia menjadi lebih baik. Mewujudkan pendidikan dengan manfaat yang bisa menyasar segenap pihak, memerlukan model pembelajaran yang mumpuni. Model segregasi gender menjadi salah satu model pembelajaran yang masih banyak diterapkan di beberapa lembaga pendidikan. Segregasi gender yang dirasa tepat demi mencegah perilaku menyimpang dari peserta didik, memudahkan pengawasan maupun membentuk pembelajaran yang fokus, nyatanya masih memiliki kekurangan. Seperti menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan kaku dan dikhawatirkan dapat kian mengganggu adanya bias gender.

Model pembelajaran dengan nuansa responsif gender dan mengaplikasikannya dalam bentuk sekolah inklusi menjadi salah satu cara demi menciptakan pendidikan yang baik dan adil bagi laki-laki maupun perempuan dengan ragam ekspresi gender yang berbeda. Nuansa responsif gender berarti menerapkan proses pembelajaran dengan memberikan perhatian secara adil baik bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Model ini memperhatikan betapa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan sama dalam mencecap pengetahuan dan bertumbuh bersama.

Dalam mewujudkan nuansa responsif gender, pemahaman terhadap kesetaraan gender itu begitu penting. Dari sinilah, maka akan membentuk pondasi yang kuat untuk menerapkan pendidikan dengan responsif gender. Laki-laki dan perempuan dalam proses belajar semestinya diletakkan pada posisi setara dan diberikan kesempatan sama untuk aktif berpartisipasi serta mengekspresikan dirinya dengan baik, tanpa takut didiskreditkan. Sekolah atau lembaga pendidikan sejenis juga menjadi wadah di mana para peserta didik

belajar untuk kemudian dapat membaur dengan realita masyarakat yang heterogen, sehingga bentuk interaksi dan kerja sama langsung antara laki-laki dan perempuan begitu diperlukan agar tidak cenderung kaku. Namun, tetap dalam semangat saling memanusiakan dan menghormati antar sesama. Tentu demi mencapai semua ini, perlu adanya kesadaran, semangat dan kontribusi dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Syaefudin. 2019. "Membangun Pendidikan Berwawasan Gender." *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14 (1): 78.
- Awaru, A Octamaya Tenri. 2020. "Konstruksi Sosial Pendidikan Seksual Pada Orangtua Dalam Keluarga Bugis-Makasar." *Jurnal Society* 8 (1).
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Furchan, A. 2004. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hangestiningih, Endang. 2015. *Diktat Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: FKIP UNJ.
- Ismail, Zulfli, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, and Fransiska Novita Elenora. 2020. "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis." *Jurnal Terakreditasi Nasional* 26 (2): 157-158.
- Kbbi.kemdikbud.go.id. 2020.
- Muafiah, Evi. 2016. "Dalam Disertasi: Segregasi Gender dalam Pendidikan di Pesantren." Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- . "Realitas Segregasi Gender di Pesantren. 2018. " *Annual Conference for Muslims Scholars*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- . "Realitas Segregasi Gender di Pesantren. 2018. " *Annual Conference for Muslim Scholars*.
- Mursidah. 2013. "Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender." *Jurnal Muwazah* 5 (2): 278.
- Prasasti, Novitasari Dwi. 2013. "Konstruksi Sosial Peserta Didik Pada Lembaga Bimbingan Belajar Non-Formal." *Jurnal Paradigma* 01 (01).
- Thoriquttyas, Titis dan Nita Rohmawati. 2018. "Segregasi Gender Dalam Manajemen Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Perempuan dan Anak* 2 (2): 289.
- Tamin, Zaini dan Subaidi. 2019 "Implementasi Segregasi Kelas Berbasis Gender Dalam Menanggulangi Interaksi Negatif Siswa di SMP Al-Falah Ketintang Surabaya." *Jurnal Studi Keislaman* 9 (1): 37-41.
- Sihotang, Rio Putra. 2017. "Pola Segregasi Pemukiman Masyarakat Pekanbaru." *Jurnal JOM Fisip* 4 (2): 4-5.

- Suharni. 2016. "Pemahaman Guru Dalam Layanan Bimbingan Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi." *Jurnal Care* 03 (3): 6-7.
- Tarmansyah. 2007. *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- Triyoga, Iwan Sudrajat dan Bambang. 2016. "Segregasi Gender Dalam Organisasi Spasial Pesantren-Pesantren Besar di Pulau Jawa." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 27 (2): 93.
- Umar. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina.
- Wibowo, Dwi Edi. 2010. "Sekolah Berbasis Gender." *Jurnal Muwazah* 2 (1): 193.
- Yanti, Siti Ida. 2019. "Hubungan Persepsi Pemisahan Kelas Laki-Laki Dan Perempuan Dengan Motivasi Belajar PAI Pada Peserta Didik SMK Darut Taqwa Purwosari Pasuruan." *Al-Manar: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (1): 33-34.
- Zubaedah, Siti. 2010. "Mengurai Problematika Gender dan Agama ." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5 (2): 244-245.